

## EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI UANG PERSEDIAAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA

*EVALUATION OF THE APPLICATION OF ACCOUNTING SYSTEM OF MONEY SUPPLY IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

**Feri Prayitno<sup>1</sup>**  
**Inggriani Elim<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: <sup>1</sup>feryprayitno2@gmail.com  
<sup>2</sup>inggrianielim@yahoo.com

**Abstrak:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan. Dalam proses penyerapan dana APBD, salah satu sistem akuntansi pengeluaran kas yang digunakan adalah sistem akuntansi Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU). Dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang dikumpulkan dengan cara observasi, inspeksi, wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di SPKD Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara yang tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan sistem akuntansi uang persediaan telah dilakukan secara efektif, artinya telah dilakukan sesuai dengan teori sistem akuntansi pengeluaran kas serta aturan yang ada mencakup fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan dan jaringan prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas.

**Kata kunci :** sistem akuntansi, uang persediaan, ganti uang

**Abstract:** Budget (APBD) is an annual financial wisdom of Local Government which is based on statutory provisions in force, as well as a variety of other considerations with a view to the preparation, monitoring, control and evaluation of the budget is done. In the process of absorption of funds from the budget, one of the cash expenditures accounting system used is the accounting system Money Supply (UP) in the form of Change of Money (GU). By using descriptive analysis collected by observation, inspection, interview and kepustakaan. Penelitian study was conducted at the Department of Agriculture and Livestock SPKD North Sulawesi Province that the main task is to carry out government affairs. Based on the results of the study money inventory accounting system implementation has been done effectively, meaning that it has carried out in accordance with the theory of cash expenditures accounting system and rules are to include related functions, which are used documents, accounting records and network procedures used cash disbursements accounting system.

**Keywords:** accounting systems, money supply, change money

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Seiring dengan peranan pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerahnya sendiri, maka daerah harus menghasilkan pendapatannya sendiri guna meningkatkan pembangunan daerah tersebut. Seperti ditegaskan dalam undang-undang(UU) No. 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu daerah untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD disusun oleh Badan Eksekutif (Pemerintah Provinsi) dan Legislatif (DPRD). Salah satu tujuan dibuat anggaran adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin pegawai dan kegiatan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya tahap pelaksanaan APBD adalah proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi ini kemudian selama tahun anggaran berjalan. Setelah tahap pelaksanaan ini kemudian dilanjutkan dengan proses pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Gubernur kepada DPRD Provinsi untuk diberikan penilaian.

. Kemudian menyusun dan melaksanakan kegiatan APBD dengan mengacu pada Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 sebagai pedoman pelaksanaan, penatausahaan hingga laporan keuangan dimana mencakup kebijakan akuntansi yang merupakan dasar yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan. Dalam proses penyerapan dana APBD, sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas yang digunakan terdiri dari 4 sub sistem yaitu sub sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan uang persediaan (UP), sub sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan ganti uang persediaan (GU), sub sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan tambahan uang persediaan (TU) dan sub sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan langsung (LS). Pelaksanaan realisasi anggaran dapat dijadikan acuan untuk mengetahui sejauh manakah anggaran tersebut dipergunakan. SKPD juga dituntut harus memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan undang-undang (UU) dan Peraturan yang berlaku agar sesuai dengan pelaksanaan realisasinya.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan (UP) di Dinas Pertanian dan Peternakan berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja waktunya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana selalu terjadi keterlambatan. Terhambatnya proses realisasi Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU) menyebabkan terhambatnya proses pengeluaran kas dalam bentuk Tambah Uang dan Pembayaran Langsung (LS), karena pekerjaan Bendahara Pengeluaran terfokus pada SPJ Uang Persediaan dimana penggunaannya untuk pengeluaran rutin kantor.

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntansi uang persediaan (UP) di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara

## TINJAUAN PUSTAKA

### Definisi Akuntansi

Akuntansi menurut Accounting Principle Board (APB) Statement no. 4 dikutip dari Harahap (2010:4) yaitu akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.

Secara umum akuntansi berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan suatu etintas secara khusus, Mulyadi (2013:23), menyatakan dari segi fungsinya sebagai berikut.

1. Suatu aktivitas penyediaan jasa; akuntansi memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), untuk membantu dalam membuat keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan tersebut.
2. Suatu Sistem Informasi; akuntansi melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan yang kemudian dikomunikasikan kepada *stakeholders* agar dapat dipakai dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perusahaan.
3. Suatu kegiatan deskriptif - analisis; akuntansi mengidentifikasi berbagai transaksi ekonomi dalam suatu perusahaan melalui tahap : a. Pengukuran, b. Pencatatan, c. Penggolongan dan d. Peringkasan, sehingga hanya informasi yang relevan dan saling berhubungan dan mampu secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan yang diintegrasikan dan disajikan dalam laporan keuangan.

### **Akuntansi Sektor publik**

Renyowijoyo (2010), menyatakan akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

### **Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas**

Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas terbagi menjadi dua bagian yaitu sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem dana kas kecil. Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah pengeluaran kas dengan menggunakan cek dan pengeluaran kas dengan menggunakan cek biasanya karena jumlahnya relatif besar.

### **Prosedur Pengeluaran Kas**

Sepertihalnya penerimaan kas, sistem pengeluaran kas juga memiliki prosedur yang dirancangedemikian rupa sehingga terhindar dari pencurian, kehilangan kas, ataupun pengeluaran-pengeluaran yang tidak tepat pengalokasiannya, sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Prosedur pengeluaran kas adalah prosedur cek untuk melunasi hutang yang sudah disetujui dan mencatat pengeluaran kas, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.

### **Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum Bagian Pertama Pengertian Pasal 1, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud sebagai berikut.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Dearah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

## **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015 terdiri atas Pendapatan dan Belanja.

### **Pengendalian Intern Pemerintah (*internal control*)**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

### **Penelitian Terdahulu**

1. Tuerah (2013) dengan judul Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas sudah efektif dan sesuai peraturan berlaku.
2. Kapoh (2015) dengan judul Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Tujuan dari penelitian Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif interpretif. Penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2012:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

### **Tempat dan waktu penelitian**

Tempat penelitian yang akan di pilih oleh peneliti adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu pada Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara waktu penelitian dalam studi kasus ini adalah selama 3 bulan yaitu pada tanggal April 2016 – Juni 2016.

### **Prosedur Penelitian**

1. Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi.
2. Setelah observasi dilakukan dan diperbolehkan mengadakan penelitian
3. Langkah-langkah penelitian selanjutnya diawali dengan mempersiapkan instrumen pendukung seperti daftar wawancara
4. (Sugiyono, dikutip dalam Miles dan Huberman, 1992), setelah wawancara dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data
5. Setelah itu, disusun pembahasan dari hasil penelitian dan dibuat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut.

## Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

## Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif interpretif. Sugiyono (2012:89) menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut, Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut. Alamat Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara adalah Kompleks Pertanian Kalasey Manado - Sulawesi Utara.

### Hasil Penelitian

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Dinas Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 4 sub sistem yaitu sebagai berikut.

1. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Uang Persediaan (UP)
2. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Ganti Uang Persediaan (GU)
3. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Tambahan Uang Persediaan (UP)
4. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Langsung (LS)

Dalam penelitian ini dibatasi pada Sub Sistem Akuntansi Penegeluaran Kas-Pembebanan Ganti Uang (GU) Persediaan. Prosedur Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Pembebanan Ganti Uang (GU).

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
6. Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)

### Pembahasan

Evaluasi atas sistem akuntansi dimaksudkan agar penulis dapat memahami setiap dokumen, catatan akuntansi, pihak yang terkait dan prosedur yang digunakan dalam proses Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU), pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Mekanisme penggunaan Uang Persediaan (UP) hanya dapat digunakan untuk pengeluaran rutin SKPD dan pengeluaran – pengeluaran pada program dan kegiatan pada pos Belanja Barang dan Jasa yang bersifat kecil dengan nominal < 10 Juta. UP (Uang Persediaan) diisi kembali dengan mekanisme Ganti Uang (GU).

Adapun pengeluaran-pengeluaran rutin SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara yang tertata dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2015 adalah sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan penyediaan kebutuhan administrasi umum
  - b. Kegiatan penyediaan kebutuhan administrasi keuangan
  - c. Kegiatan penyediaan kebutuhan administrasi barang/jasa
  - d. Kegiatan penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian
  - e. Kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi

Berikut ini adalah evaluasi sistem pengeluaran kas atas UP dalam bentuk GU pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara.

### **Evaluasi Fungsi Yang Terkait**

Sistem pengeluaran kas atas Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara dengan fungsi yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk membuat surat permohonan SPD (Surat Penyediaan Dana), mempersiapkan dokumen SPP beserta lampirannya, mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PPK-SKPD, mencatat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada dokumen penatausahaan, menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggung jawaban, melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU pada dokumen – dokumen (Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu Pengeluaran per Objek) , melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK-SKPD) untuk disahkan.

Fungsi yang dilakukan oleh PPK-SKPD bertugas untuk menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran beserta kelengkapannya, membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran, menerbitkan surat penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara SKPD tidak lengkap, membuat register SPM meneliti kelengkapan dokumen pertanggung jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan, menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek, menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek, menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode selanjutnya, meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran, meregister SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran dan meregister SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ Pengeluaran.

Fungsi yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran bertugas untuk mengotorisasi dan menerbitkan SPM, mengotorisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PPK-SKPD bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap, menandatangani SPM, menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. Fungsi yang dilakukan oleh BPK-BMD (Kuasa BUD, PPKD, SKPKD) bertugas untuk menganalisa DPA-SKPD yang ada di database, menganalisa anggaran kas pemerintah khususnya data per SKPD, menyiapkan draft SPD, mendistribusikan SPD kepada para pengguna anggaran, melakukan otorisasi SPD, melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM, mencetak SP2D, mengirimkan SP2D kepada bank, membuat dokumen-dokumen (register SP2D, register surat penolakan penerbitan SP2D dan buku kas penerimaan dan pengeluaran), mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan.

Berdasarkan pelaksanaannya setiap fungsi telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh orang yang berbeda. Verifikasi dokumen dan persyaratan menjadi hal yang sangat penting sehingga dilakukan disetiap pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara telah melibatkan beberapa bagian sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, Proses yang ada telah efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Evaluasi Dokumen Yang Digunakan**

Dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas atas Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara, sudah cukup baik dan digunakan sebagaimana mestinya. Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan permintaan dari SKPD dikeluarkan oleh PPKD selaku BUD. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran sebagai persetujuan pencairan dana diverifikasi oleh PPK-SKPD dan seorang verifikator. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

harus ditandatangani oleh Kuasa BUD agar dokumen memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan langsung diserahkan ke Bank Sulut untuk di posting ke rekening yang tertera di SPM. Dokumen yang digunakan sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dokumen yang digunakan lebih dari 1 lembar sehingga fungsi control dapat dilakukan oleh fungsi yang berhubungan. Proses yang ada telah efektif dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Evaluasi Catatan Akutansi Yang Digunakan**

Pencatatan setiap transaksi pengeluaran kas atas Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara menggunakan catatan akuntansi secara komputerisasi melalui aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Keuangan versi 2.1 oleh BPKP. Dimana semua jurnal dan neraca bisa langsung dicetak. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa catatan akuntansi telah memadai dan dapat mencegah terjadi penyimpangan, Proses yang ada telah efektif dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas atas Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU)**

Prosedur pengeluaran kas atas Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara yang ada telah membentuk sistem dan sesuai dengan *Flow chart* yang baku, namun penerapannya sering terjadi keterlambatan pada masing-masing unit kerja. Setiap unit kerja memiliki *SOP (Standar Operation Prosedur)* sehingga apabila terdapat keterlambatan maka itu disebabkan oleh karena adanya staf yang menunda-nunda pekerjaan ataupun karena adanya masalah jaringan. Hal itulah yang mengakibatkan prosedur pengeluaran kas atas UP dalam bentuk GU pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara berjalan lambat. Untuk itu sebaiknya setiap pihak terkait menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya agar tidak terjadi keterlambatan dan kesalah pahaman dalam pekerjaan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya Tuerah (2013) dimana penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang sistem dan prosedur pengeluaran kas dan hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan sistem pengeluaran kas sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dengan penelitian sebelumnya Kapoh (2015) dengan penelitian yang sama sistem dan prosedur pengeluaran kas dan hasil penelitiannya pelaksanaan sistem pengeluaran kas telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Dari dua penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa dalam sistem dan prosedur pengeluaran kas sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun untuk saat ini Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sedang mempersiapkan untuk melakukan pemerataan sumber daya manusia dan beberapa perangkat pendukung teknis.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan : Pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas atas uang persediaan di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan sesuai dengan teori sistem akuntansi pengeluaran kas serta aturan yang ada mencakup fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan dan jaringan prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas atas uang persediaan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, sudah memiliki *Standar Operasional Procedure* yang baku, namun seringkali tidak dijalankan dengan baik.

### **Saran**

1. Diharapkan Pimpinan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sehubungan dengan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang merupakan program tersendiri, maka dibutuhkan sumber daya manusia atau pegawai untuk menjalankan perangkat pendukung yang digunakan dalam sistem akuntansi dan dapat menjalankan secara benar program aplikasi tersebut.

2. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas membutuhkan perangkat pendukung teknis yang mampu bekerja dan digunakan optimal sehingga penyusunan laporan dapat dilakukan dengan baik. Perangkat pendukung teknis merupakan unit komputer yang mampu melaksanakan perhitungan-perhitungan dengan cepat dan akurat.
3. Diharapkan adanya pelatihan dalam bidang akuntansi agar dalam proses kinerja dapat berjalan sesuai yang diharapkan

### DAFTAR PUSTAKA

- Tuerah Fretty. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. Vol.1.No.3 *Jurnal EMBA*.  
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/2059/1633>. Diakses pada 24 Agustus 2016. Hal 443-453.
- Harahap Sofyan Syafri. 2010. Teori Akuntansi. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kapoh Tessa. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP) Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Vol.3.No.1. *Jurnal EMBA*.  
[http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/973/show\\_Toc](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/973/show_Toc). Diakses pada 17 Mei 2016. Hal 1052-1062.
- Moleong, L. J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Renyowijoyo Muindro. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Organisasi Non Laba. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan Ke-17. Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Pemerintah RI. 2008. Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Prov Sulut. 2008. Nomor 57 tentang Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
- Peraturan Pemerintah Prov Sulut. 2008. Nomor 91 tentang pembentukan Unit Pelaksana Tugas Dinas, Manado.
- Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri. 2007. Nomor 57 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri. 2006. Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Jakarta.
- Pemerintah Pemerintah RI. 2004. Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.